

ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID 19 PADA UMKM DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYELAMATKAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA MEDAN

Mhd. Chairul Abdi¹, Andri Soemitra², Aqwa Nasir Daulay³
Muhamammadchairulabdi98@gmail.com, andriosoemitra@uinsu.ac.id,
aqwanasirdaulay@uinsu.ac.id
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang muncul di akhir tahun 2019, menyebabkan ekonomi dunia kembali bergejolak termasuk ekonomi Indonesia. Dampak perlambatan ekonomi global juga dirasakan di dalam negeri. Mulai dari harga minyak bumi yang terjun bebas, serta harga komoditas lain seperti gas dan minyak kelapa sawit yang akan terus tertarik ke bawah. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap UMKM, Untuk melihat bagaimana Upaya Pemerintah dalam menyelamatkan UMKM di Masa Pandemi Covid 19 (Objek Penelitian UMKM Kota Medan), Untuk melihat Respon Pelaku UMKM terhadap kebijakan penyelamatan UMKM di Kota Medan? Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara pelaku UMKM di Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut, Dampak pandemi Covid 19 terhadap UMKM Kota Medan: Bahan baku yang lambat menyebabkan adanya beberapa kelangkaan bahan baku yang digunakan untuk membuat produk UMKM. 1) Terjadinya penurunan terhadap pendapatan, 2) Penurunan permintaan dan penjualan produk, 3) Pengurangan Karyawan, 3) kesulitan untuk melakukan angsuran bank. Sedangkan Upaya pemerintah dalam menyelamatkan UMKM di masa Pandemi Covid 19 yaitu Penurunan pendapatan dan eksistensi UMKM pelan-pelan telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Upaya pemerintah dalam menyelamatkan UMKM dengan mengeluarkan beberapa Program di antaranya: bantuan Uang tunai sebesar 2,4 juta setiap UMKM, penundaan cicilan dan bunga Bank selama 6 bulan, e-Katalog dan kakak asuh UMKM.

Kata Kunci: Dampak, Covid 19, Upaya Pemerintah, UMKM

PENDAHULUAN

Pengembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan. Ditujukan tidak hanya untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural. Kontribusi tersebut adalah meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.¹

¹Musran Munisu, Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Selatan, dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 12 No. 2, 2010, h. 33.

Program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan sektor usaha kecil selama ini sungguh menggembirakan. Peningkatan peran dan kegiatan usaha sektor ini semakin nampak. Mulai dari:

1. Perpajakan

Bukti dukungan pemerintah di sektor perpajakan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berupa penurunan tarif PPh Final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Harapannya dengan diskon PPh final setengah persen ada peluang dari keuntungan yang dapat digunakan untuk ekspansi usaha. Bagaimanapun juga, kemampuan modal UMKM memang relatif lebih ketat dibandingkan dengan pelaku usaha yang telah menyandang status sebagai korporasi. Sehingga, diskon tarif PPh final ini diharapkan dapat menjadi peringan beban UMKM di sektor perpajakan. Selain itu, pemerintah juga mendapatkan keuntungan lantaran pajak yang ringan diharapkan semakin meningkatkan minat pelaku UMKM untuk membayar pajak.

2. Percepatan Perizinan

Perkembangan digitalisasi, *artificial intelligence*, *internet of things*, *advance roboting* dan *cryptocurrency* adalah beberapa perubahan yang harus diantisipasi dan diikuti. Kecepatan seperti ini yang pengusaha harus sadar bahwa ada perubahan yang begitu cepat yang juga harus diikuti. Untuk mendukung perkembangan UMKM tersebut, pemerintah juga mempercepat perizinan dalam berusaha dengan meluncurkan *single submission*. Melalui aplikasi tersebut diberikan kemudahan berinvestasi melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Terobosan ini penting pasalnya sekarang sudah bukan jamannya mengurus izin berminggu-minggu.

3. Bunga Pinjaman Ringan

Pemerintah juga mendorong kemudahan dalam hal permodalan. Bunga pinjaman saat ini yang sudah semakin menurun diharapkan dapat dioptimalkan oleh para pelaku usaha. Dulu bunga pinjaman yang dibayarkan oleh pelaku UMKM bisa mencapai 24 persen per tahun . Sekarang hanya Tujuh persen. Bunga murah ini bisa dinikmati melalui jenis pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan oleh perbankan nasional. Namun, UMKM juga diharapkan dapat berusaha membuat rencana bisnis yang baik dan lengkap. Hal ini dikarenakan bank juga harus memiliki kehati-hatian dalam memberikan pinjaman sehingga pemberian pinjaman ini dapat terjamin keberlangsungannya. Pemerintah dengan upayanya mendukung UMKM juga mendirikan Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM). Lembaga ini mulai menyalurkan dana bergulir dengan pola melibatkan lembaga penjaminan seperti Jamkrindo dan Jamkrida sebagai pihak yang pertama menganalisa kelayakan proposal. Bunga yang disalurkan ternyata cukup murah, yaitu antara 4,5 persen hingga 7 persen pertahun tergantung kepada siapa pembiayaan itu disalurkan.

4. Pembinaan Usaha

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar dua persen dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal dua persen dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan BUMN

dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Tujuan program Kemitraan adalah untuk meningkatkan kemampuan para pengusaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. Sedangkan Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, yaitu program untuk membentuk calon Mitra Binaan baru dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

5. Perluas Akses Pasar

Pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga memberikan dukungan penuh ke UMKM guna melebarkan jangkauan pasar mereka. Misalnya, Kementerian Perdagangan memiliki program pameran Mall-to-Mall bekerjasama dengan APBI (Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia). Pelaku UMKM bisa memperoleh kesempatan untuk bersaing dengan produk sejenis yang dijual di mal terkemuka. Selain itu, pemerintah juga memiliki program gerakan 100.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Go Online secara serentak di 30 kota/kabupaten di Indonesia digagas seiring dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Digital Energy of Asia. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Kominfo, berkomitmen untuk mengonlinekan 8 Juta UMKM sampai tahun 2020. Komitmen ini menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam memajukan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.²

Membaca data yang ditunjukkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, UMKM secara keseluruhan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik seiring berganti tahun. Misalnya pada tahun 2017, total jumlah unit UMKM sebanyak 62.9 Lalu pada tahun 2018 total jumlah unit UMKM 63.5 dalam pemberitaan terakhir, jumlah total jumlah unit UMKM pada tahun 2019 64,2 juta³ sedangkan di kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah UMKM Kota Medan 2018 -2020

NO	Tahun	Jumlah
1	2018	773 UMKM
2	2019	1.206 UMKM
3	2020	16.620 UMKM

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan

Usaha mikro kecil di kota Medan terbukti mampu menjadi penggerak perekonomian di kota Medan, dan berperan sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat kota Medan, usaha sektor kuliner merupakan salah satu usaha yang paling banyak digelut pelaku usaha di Kota Medan. Akan tetapi ada beberapa persoalan yang dihadapi para pelaku usaha mikro kecil yang

²Paskalia, *Bukti Kepedulian Pemerintah Terhadap UMKM*, <https://www.modalakyat.id/blog/ini-nih-bukti-kepedulian-pemerintah-terhadap-umkm>, di akses pada tanggal 01 November 2020, 10.00 WIB

³Latifah, *Perkembangan UMKM di Indonesia*, <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/perkembangan-umkm-di-indonesia>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2020, 20.00 WIB

menyebabkan sebagian pelaku usaha mikro kecil dan menengah belum mampu meningkatkan pendapatannya ke tingkat yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan usahanya. Hal ini berkaitan dengan permasalahan umum yang di alami pelaku usaha selama ini. Permasalahan tersebut antara lain; sumber daya lokal, kegiatan usaha berskala kecil, proses produksi tergolong masih tradisional, dalam proses produksi banyak menyerap tenaga kerja dan tidak selalu mensyaratkan pendidikan formal dan keahlian khusus, tumbuh dari bakat dan keterampilan yang terbentuk dari pengalaman yang bersifat turun-temurun, dan tingkat pendidikan dan kreativitas pelaku usaha relatif rendah.⁴

Meskipun usaha kecil dan menengah memiliki kedudukan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional, kenyataannya masih banyak masalah yang dihadapi dalam pengembangannya. Masalah yang paling mendasar pada usaha kecil adalah masalah permodalan.⁵ Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Padahal modal sangat penting dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat.⁶ Selain itu, usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

Penanganan masalah-masalah yang terjadi di sektor UMKM, dapat dimulai dari pemberdayaan usaha kecil yang berada di daerah, mengingat UMKM pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung.⁷ Upaya ini telah dilaksanakan oleh beberapa pemerintah daerah. Kota Medan merupakan salah satu daerah yang beberapa tahun terakhir telah melakukan beberapa upaya pemberdayaan usaha kecil. Ini terbukti dengan maraknya UMKM yang munculkan, berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian, jumlah UMKM di Kota Medan mencapai 1.070 unit pada tahun 2019. Namun banyak UMKM yang merasa kesulitan dalam mendapatkan keuntungan hal ini disebabkan oleh banyak hal.

⁴Admin Pemerintah Kota Medan, *Pengembangan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*, <https://pemkomedan.go.id/hal-pengembangan-daya-saing-koperasi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html>, di akses pada tanggal 01 November 2020, 19.00 WIB.

⁵Rusdiah Nasution, Pengaruh Modal Kerja, Luas Lahan, dan Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Usaha Tani Nenas, *Skripsi*, Departemen Ekonomi Sosial Pertanian, Fakultas Pertanian Sumatera Utara, 2008.

⁶ *Ibid.*,

⁷Bachtiar Rifa'i, Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 1 No. 1, 2013, h. 131.

Semenjak presiden Joko Widodo mengumumkan virus corona telah sampai di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020 dengan 2 kasus yang ada di Depok. Semua berdampak terhadap semua lini baik ekonomi, sosial dan politik yang ada di Indonesia, kemudian pemerintah menerapkan *social distancing* di Indonesia yang ini berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Salah satau yang merasakan dampak terbesar akibat corona dan *social distancing* adalah para UMKM, seperti yang di lansir dari web KEMENKOP UKM Kementrian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menerima laporan 949 pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak wabah virus corona (Covid-19). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengajak semua pihak termasuk swasta, BUMN dan masyarakat untuk membantu UMKM agar tetap berproduksi di tengah pandemi Covid-19.⁸

Berikut keluhan para pelaku UMKM:

1. Penjualan menurun Sebanyak 774 koperasi dan UMKM atau setara dengan 68 persen, mengeluh penjualannya menurun akibat dampak wabah virus corona.
2. Sebanyak 63 koperasi dan UMKM atau 6 persen, menyatakan mengalami kesulitan bahan baku.
3. Distribusi terhambat sebanyak 111 koperasi dan UMKM atau setara dengan 10 persen menyatakan mengalami distribusi yang terhambat.
4. Kesulitan permodalan sebanyak 141 koperasi dan UMKM atau setara dengan 12 persen, menyatakan mengalami masalah permodalan.
5. Produksi terhambat sebanyak 42 koperasi dan UMKM atau setara dengan 4 persen, menyatakan mengalami produksi yang terhambat.
6. Data Jenis Produk UMKM Data Perbandingan

Grafik 1

Perbandingan Kondisi Usaha Sebelum Pandemi dan saat Terdampak Pandemi.

⁸ Kementrian koperasi dan umkm



Sumber: Katadata Insight Center (KIC).

Terdapat perbandingan yang sangat signifikan mengenai kondisi usaha sebelum dan saat terdampak covid-19 secara umum. Menurut penilaian pemaparan dalam grafik yang bersumber dari Katadata *Insight Center* pada Seminar Virtual tanggal 11 Agustus 2020, menyatakan bahwa kondisi sebelum covid-19, persentase kondisi usaha baik/sangat baik sebesar 92,7 persen, persentase kondisi usaha biasa saja sebesar 6,3 persen, dan kondisi usaha buruk/sangat buruk sebesar 1,0 persen. Dimana dalam persentase sebelum masuknya covid-19 dinilai berjalan dengan lancar, tidak banyak kendala, dan minimnya kondisi buruk dalam usaha.

Namun jika melihat kondisi usaha saat ini (per Juni 2020) menurut survey yang telah terpaparkan dalam grafik yang bersumber Katadata *Insight Center* (KIC) bahwasannya kondisi usaha buruk/sangat buruk meningkat sebesar 56,8 persen dibanding yang semulanya hanya sebesar 1,0 persen. Kondisi usaha biasa saja

juga meningkat sebesar 29,1 persen dari yang semulanya hanya 6,3 persen. Dan kondisi usaha baik/sangat baik menurun, yang semula 92,7 persen menjadu 14,1 persen.

Sehingga bisa disimpulkan terdapat berbagai dampak dari kondisi disaat adanya pandemi covid-19, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI ada beberapa dampak yang timbul, yakni:

- Penurunan permintaan dan turunnya penjualan;
- Penurunan kegiatan, kesulitan sampai dengan penutupan usaha (sementara/tetap);
- Distribusi terhambat;
- Kesulitan bahan baku;
- Kesulitan mendapatkan permodalan usaha.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Omzet Usaha Katadata *Insight Center* melaporkan data penelitian dari para responden (pelaku usaha) yang terdampak covid-19, ada perubahan omzet usaha akibat dampak pandemi covid-19. Dimana sebanyak 63,9 persen para pelaku usaha mendapati penurunan omzet usaha lebih dari 30% dan sebesar 31,7 persen para pelaku usaha mendapati penurunan kurang dari 30%. Sebanyak 2,2 persen yang mengalami kenaikan omzet kurang dari 30% dan terdapat 1,6 persen yang mendapati peningkatan omzet

usaha lebih dari 30%. Dan sisanya, terdapat 0,6 persen yang tidak mendapati perubahan signifikan terkait omzet usahanya.

Virus corona berdampak terhadap seluruh UMKM yang ada di Indonesia tidak terkecuali para UMKM di kota Medan juga merasakan dampak yang sama, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di beberapa UMKM di kota Medan mereka mengatakan virus corona berdampak besar terhadap penjualan, dikarenakan sepi pembeli. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam menyelamatkan UMKM dari keterpurukan yang di akibatkan oleh pandemi COVID19, Melalui kementerian koperasi dan UMKM pemerintah menetapkan berbagai regulasi dalam menyelamatkan UMKM yaitu⁹:

1. Mendorong 98 persen pelaku usaha mikro dan ultra mikro untuk masuk ke dalam kelompok miskin baru
2. Penundaan cicilan dan bunganya hingga 6 bulan, karena sebagian besar UMKM mengalami masalah keuangan
3. Pembiayaan UMKM dan koperasi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)
4. Mendorong agar belanja pemerintah diprioritaskan bagi produk UMKM
5. Memberikan Bantuan Langsung Tunai UMKM sebesar Rp. 2.400.000

Sejauh ini dukungan yang di berikan pemerintah terhadap UMKM sudah dirasakan UMKM di Kota Medan hal ini terlihat Penundaan cicilan dan bunganya hingga 6 bulan, dan menerima bantuan langsung tunai UMKM sebesar Rp. 2.400.000. Akan tetapi tidak semua UMKM merasakan dan mendapatkan hal yang sama, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada UMKM yang berada di Medan Johor, beberapa UMKM mengeluhkan bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran, selain itu adanya beberapa *leasing* dan Bank yang tidak mengindahkan imbauan Pemerintah Untuk penundaan cicilan dan bunga di masa Pandemi COVID 19

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang sebagai objek penelitian dan perilaku yang dapat diamati sehingga merupakan rinci dari suatu fenomena yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pada Berdasarkan Uji *Paired Sample t Test* di pendataan UMKM sebelum dan sesudah pandemi covid 19 memiliki perbedaan yang signifikan perbedaan pendapatan ini di karenakan adanya covid 19 yang mengakibatkan pembatasan buka tutup toko, adanya pembatasan msyarakat dan beberapa hal lainnya.

Tabel 2
Hasil Uji *Paired Sample t Test*

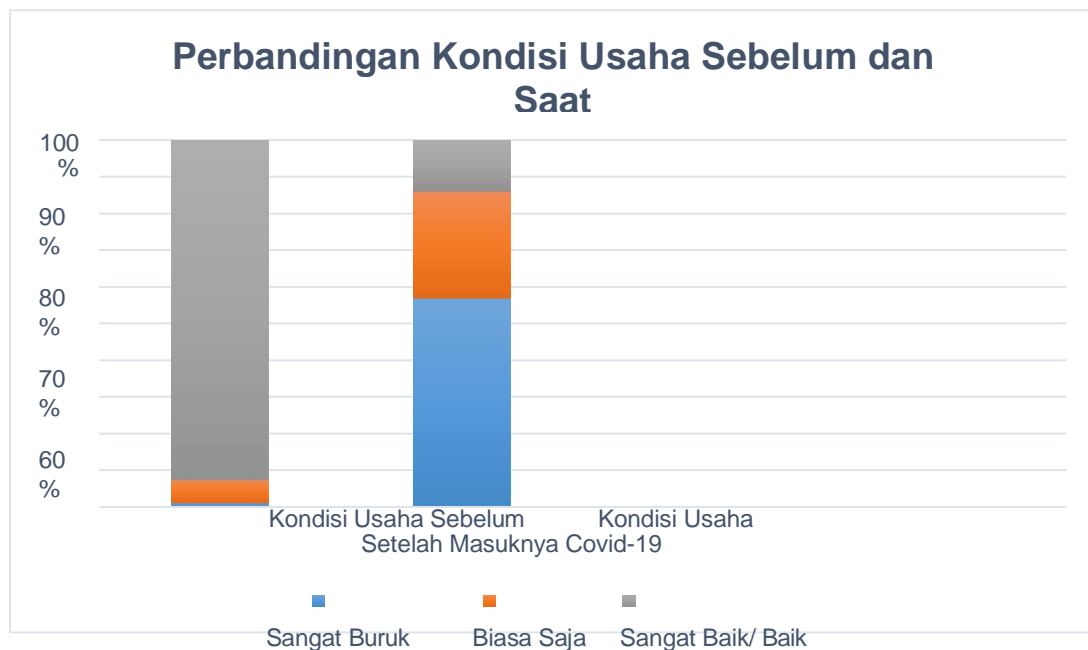
	Paired Differences		Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	
sebelum - sesudah	-0,81333	1,10138	0,029

⁹ Kementerian koperasi dan umkm

Berdasarkan dari tabel 4.4 di ketahui bahwa nilai signifikan di dapat adalah sebesar $0,029 < 0,05$ sehingga dapat di simpulkan bahwa pendataan UMKM sebelum dan sesudah pandemi covid 19 memiliki perbedaan yang signifikan.

Data Perbandingan Kondisi Sebelum Pandemi dan Saat Terdampak Pandemi Covid-19

Grafik 2
Perbandingan Kondisi Usaha sebelum pandemi dan saat terdampak pandemi.



Sumber: Katadata Insight Center (KIC).

Terdapat perbandingan yang sangat signifikan mengenai kondisi usaha sebelum dan saat terdampak covid-19 secara umum. Menurut penilaian pemaparan dalam grafik yang bersumber dari Katadata *Insight Center* pada Seminar Virtual tanggal

11 Agustus 2020, menyatakan bahwa kondisi sebelum covid-19, persentase kondisi usaha baik/sangat baik sebesar 92,7 persen, persentase kondisi usaha biasa saja sebesar 6,3 persen, dan kondisi usaha buruk/sangat buruk sebesar 1,0 persen. Dimana dalam persentase sebelum

masuknya covid-19 dinilai berjalan dengan lancar, tidak banyak kendala, dan minimnya kondisi buruk dalam usaha.

Namun jika melihat kondisi usaha saat ini (per Juni 2020) menurut survey yang telah terpaparkan dalam grafik yang bersumber Katadata Insight Center (KIC) bahwasannya kondisi usaha buruk/sangat buruk meningkat sebesar 56,8 persen dibanding yang semulanya hanya sebesar 1,0 persen. Kondisi usaha biasa saja juga meningkat sebesar 29,1 persen dari yang semulanya hanya 6,3 persen. Dan kondisi usaha baik/sangat baik menurun, yang semula 92,7 persen menjadu 14,1 persen.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap pelaku UMKM yang ada di Kota Medan, maka ditemukan hasil bahwa secara umum pelaku UMKM terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebanyak 45,71% UMKM tidak mengalami permasalahan akibat Covid-19. Adapun UMKM yang tidak mengalami permasalahan tersebut, adalah UMKM yang bergerak dibidang kesehatan, makanan dan pengolahan pangan. Hal ini menunjukkan, dimasa Covid-19 masyarakat tetap membutuhkan makanan untuk meningkatkan imun tubuh dan alat-alat kesehatan. Bahkan saat adanya Covid-19, industri makanan menjadi barang yang paling dicari oleh masyarakat untuk bekal dirumah (*work from home*). Demikian juga dengan alat-alat kesehatan, sempat mengalami lonjakan permintaan dan lonjakan harga. Hal ini disebabkan karena adanya rumor beberapa alat-alat kesehatan seperti masker, *handsanitizer*, alkohol dan lainnya akan langka dipasaran. Akibatnya masyarakat memborong alat-alat kesehatan yang ada di pasaran, yang mengakibatkan kelangkaan barang dan terjadinya kenaikan harga. Kondisi ini tidak berlangsung lama, karena pemerintah mampu mengendalikan pasar dan membuat kebijakan yang pro terhadap penyediaan alat-alat kesehatan bagi masyarakat, bahkan memberikan sumbangan secara gratis. Namun demikian ternyata dampak negatif Covid-19 terhadap UMKM sebesar 54,29%. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan berkaitan dengan: (1) pembatasan buka toko, warung, kios dan pasar, (2) kebijakan *work from home* dan adanya sistem *sift* antar pegawai, dan (3) pembatasan terhadap keramaian atau kerumunan. Kebijakan pembatasan buka toko, warung, kios dan pasar menyebabkan lesunya perekonomian dan masyarakat menjadi enggan untuk berbelanja. Masyarakat hanya akan membeli barang-barang kebutuhan pokok, sedangkan barang-barang yang dinilai masih produktif secara ekonomi masih tetap di berdayakan. Demikian juga dengan UMKM yang melakukan penjualan secara terbatas baik di pasar, warung-warung, kios dan perumahan pribadi. Disisi lain kebijakan *work from home* bagi pegawai kantoran menjadikan proses permintaan semakin menurun. Karena hampir semua pegawai kantoran bekerja dari rumah, maka mereka memiliki waktu untuk memasak buat keluarganya dan enggan untuk keluar membeli makanan. Bahkan beberapa produk yang sebelumnya wajib dibeli kini dibuat di rumah, sehingga mampu mengisi waktu luang. Terlebih kebijakan pelarangan terhadap kerumunan menjadikan tempat-tempat wisata menjadi sepi, bahkan tutup. Hari sabtu dan hari minggu yang biasanya digunakan untuk liburan dan membeli aneka makanan, minuman dan mainan dengan adanya pembatasan kerumunan tidak terjadi lagi.

Kebijakan pemerintah dalam merespon problematika ekonomi di era pandemi COVID-19 melalui pemberdayaan para pelaku UMKM sesuai yang telah disampaikan di atas merupakan sebuah langkah dan peran tanggung jawab yang diberikan oleh negara untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Karena negara memiliki kewajiban untuk menjaga

stabilitas ekonomi dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyatnya, termasuk kebutuhan ekonomi. Sehingga kebijakan dan langkah yang diberikan pemerintah di atas merupakan sebuah terobosan yang sangat luar biasa dalam hal perekonomian. Salah satu bentuk bantuan yang dikeluarkan Pemerintah berupa bantuan uang tunai kepada pelaku UMKM sebesar Rp 2,4 juta. Sebagai tahap awal dan juga berupa penundaan cicilan dan bunga bank selama 6 bulan, jumlah UMKM yang akan menerima bantuan ini sebanyak 9,1 juta UMKM, bantuan ini sedikit banyaknya membantu UMKM yang mengalami penurunan omset dan modal akibat Covid 19. Program ini juga di rasakan semua UMKM yang mengurus bantuan dengan melengkapi berkas yang sudah di tentukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota/Kabupaten masing-masing.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang meluncurkan e-katalog sejak awal Juli 2020. Peluncuran e-katalog ini bertujuan guna meningkatkan daya saing dan kemampuan para pelaku UMKM di era digital, mengingat hanya sekitar 4 sampai 10 persen para pelaku UMKM yang mampu bersaing di era digital saat ini. Minimnya nilai tersebut didasari oleh rendahnya pendidikan dan sosialisasi penjualan online kepada para pelaku UMKM. UMKM memang mengalami banyak kendala dalam penggunaan teknologi digital. Sebanyak 34 persen pelaku UMKM masih belum bisa menggunakan internet dan 23,8 persen mengindikasikan minimnya pengetahuan dalam menjalankan bisnis online. Selain adanya program dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupa e-katalog, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga mengeluarkan program Kakak Asuh UMKM guna menangani dan mengatasi adanya kesenjangan pengetahuan teknologi oleh para pelaku UMKM. Usaha ini juga bertujuan untuk merealisasikan target sebanyak 2 juta para pelaku UMKM beralih pada penggunaan digital dalam usahanya pada akhir tahun 2020, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan para pelaku UMKM Kota Medan program ini belum sampai kepada UMKM di Kota Medan dan tidak pernah mengikutinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut dampak pandemi covid 19 terhadap umkm kota medan Bahan baku yang lambat menyebabkan adanya beberapa kelangkaan bahan baku yang digunakan untuk membuat produk umkm, terjadinya penurunan terhadap pendapatan, penurunan permintaan dan penjualan produk, pengurangan karyawan, kesulitan untuk melakukan angsuran bank. Sedangkan upaya pemerintah dalam menyelamatkan UMKM di masa Pandemi Covid 19, Penurunan pendapatan dan eksistensi UMKM pelan-pelan telah mengalami penurunan yang sangat drastis. Upaya pemrintah dalam menyelamatkan UMKM dengan mengeluarkan beberapa Program di antaranya: bantuan Uang tunai sebesar 2,4 juta setiap UMKM, penundaan cicilan dan bunga Bank selama 6 bulan, e-Katalog dan kakak asuh UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Pemerintah Kota Medan. *Pengembangan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. <https://pemkomedan.go.id/hal-pengembangan-daya-saing-koperasi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html>, di akses pada tanggal 01 November 2020, 19.00 WIB.
- Alodokter, "Gejala Covid-19", <https://www.alodokter.com/virus-corona>. Dilihat pada tanggal 15 juni 2020, 22.00 WIB

- Arief Rahmana. *Kinerja UMKM di Indonesia*, <http://infoUMKM.wordpress.com>, diakses Tanggal 11 Desember 2013.
- Arikunto, Suharsimi. .2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aries Heru Prasetyo. 2010. *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Andri Soemitra, *Kewirausahaan berbasis Syariah*, Medan; CV. Manhaji Dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UIN-SU Medan 2015
- Azhari Akmal Tarigan, et.al., *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Ekonomi Islam Medan*: Wal Ashri Publishing, 2013
- Bahtiar dan Juli Panglima Saragih, Rais Agil. “Dampak Covid-19 Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM”, (Info Singkat: Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No. 6/II/Puslit/Maret 2020), h. 20 diakses melalui https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-6-II-P3DI-Maret-2020-1982.pdf
- Breman, Jan. *A Dualistic Labour System? A Critique of the 'Informal Sector' Concept: I: The Informal Sector*. *Economic and Political Weekly* Vol. 11, No. 48 (Nov. 27, 1976), pp. 1870-1876
- Departemen Agama R.I. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Cipta Media).
- Feige, Edgar L.. 1990. *Defining And Estimating Underground And Informal Economies: The New Institutional Economics Approach* dalam *World Development*, Vol 18, No 7.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2020. *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Hardilawati, Laura. 2020, “Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 The Survival Strategy Of Smes During The Covid-19 Pandemic Wan Laura Hardilawati”
- Hart, Keith. *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana* dalam *The Journal of Modern African Studies*. Vol. 11, No. 1, Mar., 1973 pp. 61-89
- Hendartyo, Muhammad. “Survei BI: 72 Persen Pelaku UMKM Terdampak Pandemi Corona”, (Tempo: Bisnis), diakses melalui pada 10 Desember 2020 pukul 11.05 WIB.
- Henry Faizal, Noor. 2007. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iken Djunaedi. 2002. *Pembukuan Super Sempel*, Jakarta: Media Presindo.
- Izzudin, *UMKM sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi*, <http://ekbis.sindonews.com>, diakses Tanggal 11 Desember 2013.
- Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. 2006. *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan.

- Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah. “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017- 2018” diakses pada 10 Desember 2020 pukul 10.30 WIB.
- Kristianus, Arnoldus. “Kemenkop UKM: 90% UMKM Terdampak Pandemi Covid-19”, (Investor Daily Indonesia: Business, 30 Oktober 2020), di akses melalui <https://investor.id/business/kemenkop-ukm-90-umkm-terdampak-pandemi-covid19>, pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 11.05 WIB.
- Latifah, *Perkembangan UMKM di Indonesia*, <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/perkembangan-umkm-di-indonesia>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2020, 20.00 WIB
- Lussier, R. N. & Pfeifer. 2001. *Crossnational Prediction Model For Business Succes*, Journal Of Smal Bussies Management, 30(3), 228-239.
- Mubyarto. 2002. *Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Gerakan Koperasi: Peran Perguruan Tinggi*. Di akses melalui <http://mubyarto.org>
- Mujibatun, Siti. 2012. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang, Lembaga Studi Sosial Dan Agama (Elsa).
- Mulyanto, Dede. 2006. *Usaha Kecil dan Persoalannya di Indonesia*. (Bandung: Yayasan Akatiga,)
- Munisu, Musran. 2010. “Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Sulawesi Selatan”, dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 12 No. 2.
- Muhammad Arif, Pengantar Bisnis. Medan: FEBI UIN-SU Press
- Nasution, Rusdiah. 2008. “Pengaruh Modal Kerja, Luas Lahan, dan Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Usaha Tani Nenas”. [Skripsi, Departemen Ekonomi Sosial Pertanian, Fakultas Pertanian Sumatera Utara]
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002
- Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016
- Octivany Nurhaida. 2009. *Pencatatan Pendapatan*, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Paskalia. *Bukti Kepedulian Pemerintah Terhadap UMKM*, <https://www.modalrakyat.id/blog/ini-nih-bukti-kepedulian-pemerintah-terhadap-umkm>, di akses pada tanggal 01 November 2020, 10.00 WIB.
- Pakpahan, Aknolt Kristian. 2020, COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Prayoga, Fadel. “5 Jenis UMKM yang Paling Terdampak Covid-19”, (Okezone.com: Oke Finance, Ekonomy, Sektor Rill, 15 Juli 2020), diakses melalui <https://economy.okezone.com/read/2020/07/15/320/2246713/5-jenis-umkm-yang-palingterdampak-covid-19>, pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 12.01 WIB.

- Rahman, Riska. "37.000 SMESs hit by Covid-19 crisis as government prepares aid", (The Jakarta Post: Business, 16 April 2020), diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/37000-smes-hit-by-covid-19-crisis-asgovernment-prepares-aid.html>, pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 09.00 WIB.
- Rusdiah, Nasution, *Pengaruh Modal Kerja, Luas Lahan, dan Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Usaha Tani Nenas*, Departemen Ekonomi Sosial Pertanian, Fakultas Pertanian Sumatera Utara, 2008.
- Rifa'i, Bachtiar. 2013. *Efektifitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 1 No. 1.
- Santia, Tira. "Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? Ini Hitungannya", (Liputan6.com; Bisnis, Ekonomi, 4 September 2020), diakses pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 11.00 WIB.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Graha Ilmu.
- Shofiana, Amaliya. 2020, *Implementasi Program Afiliasi Berbasis Virtual Team Dalam Umkm Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Pada Masa Pandemi Covid-19*
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- _____. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: alfabeta.
- _____. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- Sukimadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Suryana. 2013. *Kewirausahaan: Pendekatan Karakteristik Wirausaha Sukses*. Jakarta: Kencana.
- Sunarji Harahap, *Studi Kelayakan Bisnis* Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016
- Smith, Philip. —*Assessing the Size of the Underground Economy: the Statistics Canada Perspective*.|| *Statistics Canada* – Catalogue no. 13-604 no. 28, Mei 1994.
- Syahrum dan Salim. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Undang-Undang No 28, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, <https://www.ojk.go.id/> , di akses pada tanggal 01 November 2020, 13.00 WIB
- Zaroni, Akhmad Nur. 2007. *BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib Vol. IV, No. 2, Desember.